

ANOMALI DEMOKRASI INDONESIA: Kontroversi Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah dalam masa Pandemi Covid-19

Laode Harjudin ¹, La Husein Zuada ², Muhammad Ishak Syahadat ³

^{1,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako

Correspondent author: laode.harjudin@uho.ac.id

Kota Kendari, 93231, Sulawesi Tenggara, Indonesia

Abstract

This study discusses the implementation of regional head elections in Indonesia which took place during the Covid-19 pandemic. The study focuses on explaining the high level of voter turnout when Covid-19 hit Indonesia in 2020 which exceeded the turnout rate in normal situations and contrary to the trend of declining global voter turnout. This research uses descriptive qualitative methods with secondary data obtained from official government institutions (especially the election commission and Ministry of Health), mass media both newspapers and other social media, as well as the results of research conducted by other researchers. The results showed that the high level of voter turnout during the Covid-19 pandemic was an anomaly of democracy in the midst of activity restrictions and the trend of declining global voter turnout. The high voter turnout during the Covid-19 pandemic was inversely proportional to the economic downturn and public confidence in government. This study found that the main factor for increasing voter turnout during the Covid-19 pandemic was the massive mobilization of social assistance funds from the government. Theoretically, this is a synthesis of the mobilization model and the general incentives model of participation in a pragmatic context.

Keywords: local elections; political participation; the covid-19 pandemic; voter turnout

Abstrak

Studi ini membahas pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara nasional di Indonesia yang berlangsung pada masa pandemi covid-19. Studi lebih fokus menjelaskan tingginya tingkat partisipasi pemilih (voter turnout) pada saat covid-19 melanda Indonesia Tahun 2020 yang melebihi tingkat partisipasi pemilih dalam situasi normal dan bertolak belakang dengan trend tingkat partisipasi pemilih global yang semakin menurun. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data sekunder yang diperoleh dari lembaga resmi pemerintah (KPU, Bawaslu), media masa baik koran maupun media sosial lainnya, serta hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya tingkat partisipasi pemilih pada masa pandemi covid-19 merupakan anomali demokrasi di tengah pembatasan aktivitas dan trend tingkat partisipasi pemilih global yang semakin menurun. Tingginya partisipasi pemilih pada masa pandemi covid-19 justru berbanding terbalik dengan kemerosotan ekonomi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Studi ini menemukan bahwa faktor utama meningkatnya partisipasi pemilih pada masa pandemi covid-19 karena mobilisasi dana bantuan sosial secara massif dari pemerintah. Secara teoritis hal ini merupakan sintesis the mobilization model and the general incentives model of participation dalam konteks yang pragmatis.

Kata Kunci: partisipasi politik; pandemi Covid-19; pemilihan kepala daerah

PENDAHULUAN

Bersamaan dengan semakin meningkatnya wabah pandemic Covid-19 berlangsung pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak di Indonesia. Pelaksanaan pemilihan tersebut menuai banyak kontroversi karena dilaksanakan dalam suasana pandemi Covid-19. Banyak pihak yang mengkhawatirkan penyelenggaraan pilkada tersebut karena terlalu berisiko terhadap kesehatan penyelenggara, peserta, dan pemilih di tengah pandemi Covid-19. Selain soal jaminan kesehatan, persoalan lain yang menjadi sorotan mengarah pada politisasi bantuan sosial (bansos) Covid-19 dan penyalahgunaan anggaran yang dilakukan calon petahana. Persoalan-persoalan tersebut dianggap berpotensi menurunkan kualitas penyelenggaraan pilkada yang demokratis.

Namun demikian, pemerintah Indonesia tetap berkekuatan melaksanakan pilkada pada Desember 2020 secara nasional di seluruh Indonesia. Untuk mengesahkan keinginannya, pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada di Masa Pandemi sebagai landasan hukum pelaksanaan pilkada di masa pandemi. Langkah pemerintah mendapat dukungan politik dari DPR yang menyetujui Perppu tersebut dengan alasan yang agak klise bahwa Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tak mempersoalkan rencana tersebut.

Upaya pemaksaan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19 menunjukkan adanya ambivalensi sikap dan kebijakan pemerintah dalam mencegah penularan virus corona. Di satu sisi, pemerintah menerapkan kebijakan yang semakin memperketat aturan berkaitan dengan mobilisasi warga, di sisi lain memaksakan pelaksanaan pilkada yang menghendaki mobilisasi dan partisipasi warga masyarakat yang luas. Kedua sisi ini hampir mustahil dapat dipertemukan karena masing-masing memiliki parameter yang berbeda, bahkan bertentangan. Pencegahan penularan Covid-19 mengharuskan orang untuk membatasi aktivitas warga secara ketat, sementara pilkada memerlukan keterlibatan masyarakat secara masif dan bebas.

Namun anehnya tingkat partisipasi pemilih pilkada masa pandemi Covid-19 di Indonesia tahun 2020 sangat tinggi. Menurut data Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) bahwa tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2020 secara keseluruhan mencapai 76,09 persen (KPU, 2020). Tingkat partisipasi pemilih tersebut merupakan jumlah tertinggi dalam lima pilkada terakhir, terutama sejak dilaksanakan secara serentak di Indonesia. Lebih aneh lagi partisipasi pemilih pilkada masa pandemi Covid-19 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibanding dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Tingkat partisipasi pilkada masa pandemi Covid-19 mengalahkan partisipasi pemilih pada pilkada yang dilaksanakan dalam situasi normal ketika tidak ada pembatasan aktivitas masyarakat. Perbandingan tingkat

partisipasi pemilih antara pilkada sebelum dan saat masa pandemi Covid-19 dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Diagram Tingkat Partisipasi Pemilih di Pemilihan Terakhir (2014-2020)



Sumber: kpu.go.id dan databoks.katadata.go.id

Data di atas bertolak belakang dengan trends tingkat partisipasi global yang semakin menurun. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa jumlah pemilih (*voter turnout*) terus menurun di banyak negara setelah 20-30 tahun terakhir. Sampai tahun 1980-an, *voter turnout* masih relative stabil antara 78 sampai 76 persent. Namun menurun drastis pada 1990an sampai 70 persent dan 66 persent antara 2011-2015.

Indeks yang menurun menandakan semakin besarnya sikap apatis dan ketidakpercayaan pemilih terhadap proses demokrasi di beberapa negara (Solijonov, 2016). Menurut Uberoi (2021) bahwa selama seratus tahun terakhir, jumlah pemilih di Inggris merupakan yang tertinggi yaitu sebesar 83,9 persen pada tahun 1950, namun proporsi ini telah menurun menjadi 67,3 persen pada tahun 2019. Sesuai data Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) yang berbasis di Swedia, jumlah pemilih yang berpartisipasi di Amerika Serikat adalah 89,7 persen pada tahun 1968, namun turun menjadi 56,8 persen pada tahun 2018. Di Prancis, jumlah pemilih yang berpartisipasi menurun dari 82,7 persen pada tahun 1956 menjadi 48,7 persen pada tahun 2017. Begitu pula di Jerman. mengalami penurunan partisipasi pemilih dari 87,8 persen pada tahun 1957 menjadi 76,2 persen pada tahun 2017 (IDEA, 2021).

Fenomena peningkatan partisipasi pilkada 2020 juga seakan mengingkari logika berpikir partisipasi dan demokrasi yang menghendaki kebebasan. Hampir semua konsepsi

tentang partisipasi dan demokrasi mmempersyaratkan kebebasan sebagai indikator keberhasilannya. Karena itu, peningkatan angka partisipasi pada saat pembatasan aktivitas warga ketika terjadi pandemi virus corona (Covid-19) menjadi pertanyaan yang menarik untuk ditelusuri. Bahkan, tanpa dibatasi sekalipun masyakat masih diliputi kekhawatiran dan rasa was-was untuk beraktivitas karena pelaksanaan pilkada yang berlangsung pada bulan Desember 2020 saat penyebaran virus corona (Covid-19) semakin meluas.

Merujuk pada logika pembatasan aktivitas masyarakat dalam masa pandemi Covid-19 agak sulit untuk membayangkan angka partisipasi pemilih akan tinggi pada pilkada dalam kondisi demikian. Namun, realitasnya tingkat partisipasi pemilih di Indonesia dalam masa pandemi Covid-19 sangat tinggi, bahkan melampaui angka partisipasi pilkada dalam situasi normal ketika tidak ada wabah penyakit dan pembatasan aktivitas masyarakat.

Pertanyaannya kemudian, mengapa partisipasi pemilih dalam pilkada pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia justru mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan masa situasi normal? Studi ini menelusuri beberapa faktor yang menjelaskan tingginya tingkat partisipasi pemilih pada regional head election di masa pandemi Covid-19 di Indonesia. Fenomena ini semakin menarik karena faktanya seakan menjadi anomali dari kecenderungan menurunnya tingkat partisipasi politik global dalam sepuluh tahun terkahir.

Review Konseptual

Para ilmuwan politik sudah cukup banyak meneliti dan menjelaskan mengapa terjadi penurunan ataupun peningkatan partisipasi politik, terutama dalam pemilu. Berbagai usaha para ilmuwan telah membuat perkembangan teori partisipasi politik. Beberapa teori tersebut berusaha secara maksimal menjelaskan mengapa orang mau memberikan suaranya dalam pemilu.

Dalam literatur ilmu politik selama ini berkembang lima pendekatan teori tentang partisipasi politik. Teori-teori tersebut berkembang secara simultan mulai dari model voluntarisme warga (*the civic voluntarism model*), model pilihan rasional (*the rational choice model*), model sosial-psikologis (*the social-psychological model*), model mobilisasi (*the mobilization model*), dan model insentif umum (*the general incentives model*). Masing-masing teori memiliki tradisi pemikiran yang berbeda.

Model patisipasi politik yang sangat dikenal luas dalam ilmu politik adalah model voluntarisme warga. Model ini merupakan karya Sidney Verba and Norman Nie (1972) dalam penelitian tentang partisipasi di United States. Gagasan sentral model voluntarisme warga menekankan tiga aspek yang mempengaruhi partisipasi politik, yakni aspek sumber daya (*the resources aspect*), aspek keterlibatan psikologis (*the psychological engagement aspect*), dan aspek jaringan rekrutmen (*the recruitment networks aspect*). Aspek sumber daya dalam kaitannya dengan "waktu, uang, dan keterampilan sipil." Aspek keterlibatan

psikologis menekankan rasa efektivitas politik individu, dan, akhirnya, aspek jaringan perekrutan didefinisikan sebagai "permintaan untuk partisipasi yang datang pada individu di tempat kerja, di gereja, atau dalam organisasi—terutama yang datang dari teman, kerabat, atau kenalan" (Verba, Schlozman, dan Brady 1995: 271-272).

Model ini menunjukkan bahwa faktor sikap memainkan peran penting dalam menjelaskan partisipasi politik dengan baik. Hal ini sebagaimana mereka tekankan dalam versi terbaru teori ini. Namun demikian, model voluntarisme warga memiliki masalah terutama berkaitan dengan hubungan antara status socioeconomic dengan partisipasi dan nilai-nilai kewargaan (*civic values*). Sebagaimana dipostulasikan Verba and kolaboratornya menunjukkan bahwa individu-individu berstatus tinggi terwakili secara berlebihan dalam kategori partisipan yang sangat aktif dan kurang terwakili dalam kategori tidak aktif. (Verba and Nie 1972: 131-33). Asumsi di atas kemudian dipertanyakan karena faktanya banyak individu yang memiliki status sosial ekonomi tinggi tidak ikut terlibat dalam politik. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Verba dan rekan-rekannya:

The SES model is weak in its theoretical underpinnings. It fails to provide a coherent rationale for the connection between the explanatory socioeconomic variables and participation. Numerous intervening factors are invoked—resources, norms, stake in the outcome, psychological involvement in politics, greater opportunities, favorable legal status, and so forth. But there is no clearly specified mechanism linking social statuses to activity. (Verba, Schlozman, and Brady 1995: 281)

Persoalan tersebut menjadi bagian paradox partisipasi karena mestinya makin tinggi socioeconomic statuses makin tinggi tingkat partisipasinya. Namun demikian masih sulit menemukan bukti adanya kaitan antara socioeconomic statuses dengan peningkatan partisipasi. Bahkan beberapa hasil penelitian di negara-negara industri maju dengan tingkat pertumbuhan pendidikan dan ekonomi tinggi termasuk dalam kasus Amerika Serikat, jumlah pemilih dan partisipasi dalam organisasi sukarela sebenarnya menurun, bukannya meningkat (Brody 1978; Putnam 1995; Miller and Shanks 1996).

Persoalan utama the civic voluntarism model sulit menjelaskan alasan pragmatis individu untuk terlibat dalam politik, terutama insentif apa yang mereka miliki untuk terlibat dalam politik. Banyak high-status individuals kekurangan insentif, yang menjelaskan mengapa tidak terlibat dalam politik. Ada kebutuhan untuk mempertimbangkan insentif untuk berpartisipasi agar dapat memahami mengapa individu terlibat dalam politik.

Teori selanjutnya yang berperan penting dalam analisis partisipasi politik adalah teori pilihan rasional. Teori pilihan rasional diterapkan untuk menjelaskan partisipasi politik dalam menghadapi masalah utama, yang disebut paradoks partisipasi. Gagasan utama teori

pilihan rasional menunjukkan bahwa aktor rasional tidak akan berpartisipasi dalam tindakan kolektif untuk mencapai tujuan bersama karena produk dari tindakan kolektif tersebut adalah kebutuhan publik (*public goods*) (Olson, 1965). Olson menegaskan bahwa tujuan dan program kebijakan, yang merupakan "produk" dari sebuah partai politik, adalah kebutuhan publik, dan sebagai konsekuensinya aktor-aktor yang rasional mempunyai insentif untuk mengambil alih upaya pihak lain dan membiarkan mereka bekerja untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Akibatnya, organisasi sukarela seperti partai tidak akan mendapat bantuan dari individu yang rasional dan mementingkan diri sendiri jika tidak ada jenis insentif lain untuk berpartisipasi. (Olson 1965: 9–11).

Gagasan *rational choice theory* memiliki nilai yang berusaha untuk menjelaskan lebih jauh tentang paradoks partisipasi (*the paradox of participation*). Hal tersebut menyediakan insentif yang masuk akal untuk melibatkan beberapa individu dalam politik. Persoalannya kemudian apakah pandangan tersebut dapat diterapkan secara tuntas mengatasi paradoks partisipasi terutama untuk voting, dimana insentif demikian sebagian besar tidak ada. Persoalan ini menjadi semakin rumit karena individu dimotivasi oleh pertimbangan self-interest ketika mereka terlibat dalam politik. Hal ini berarti bahwa *rational choice account* menyediakan suatu penjelasan yang belum tuntas tentang persoalan partisipasi politik.

Pendekatan teoritis ketiga terhadap partisipasi politik datang dari literature psikologi yang sangat penting dalam memahami bentuk partisipasi yang ekstrim, seperti perilaku protes dan aksi pemberontakan kolektif (Muller 1979; Finkel, Muller, dan Opp 1989; Muller, Dietz, dan Finkel 1991; Finkel dan Opp 1991). Salah satu varian model psikologi sosial adalah teori ekspektasi-nilai-norma yang muncul dari Muller (1979: 23–31), yang didasarkan pada karya Fishbein dan kolaboratornya (Fishbein 1967; Azjen and Fishbein 1969).

Teori psikologi social memusatkan perhatian pada pengukuran sikap individu terhadap perilaku ketimbang terhadap tujuan perilaku itu. Jika diaplikasikan pada partisipasi politik, hal ini berarti warga negara harus ditanyai tentang sikap mereka terhadap berbagai jenis perilaku protes, bukan sekedar tentang sikap mereka terhadap undang-undang atau peristiwa politik yang tidak adil yang mungkin memicu perilaku tersebut.. Dalam konteks *expectations-values-norms theory* menjelaskan perilaku dalam dua faktor besar: manfaat yang diharapkan dan norma-norma sosial. Di satu sisi individu dipandang sebagai utilitarian yang menghitung manfaat dari tindakan yang berbeda, meskipun dalam model ini tidak ada perbedaan yang dibuat antara manfaat pribadi dan kolektif dari tindakan politik. Di sisi lain mereka dilihat sebagai aktor yang tertanam dalam jaringan norma dan keyakinan sosial, yang memberikan motivasi internal dan eksternal untuk berperilaku dengan cara tertentu (Muller, 1979: 69–100).

Varian model yang muncul dari pendekatan ini diklaim sukses untuk menjelaskan jenis-jenis partisipasi yang tidak lazim dalam berbagai sistem demokrasi. Namun demikian, teori ini masih menghadapi masalah seperti teori-teori lain. Masalah utama dengan model psikologis sosial adalah bahwa teori tersebut tidak memperhatikan rasionalitas pengambilan keputusan. Masalah ini mengulang kelemahan model pilihan rasional yang tidak lengkap memberikan penjelasan tentang partisipasi politik. Kurangnya perhatian mereka pada dasar objektif terhadap pengaruh politik merupakan kelalaian serius yang perlu diperbaiki jika mereka ingin memberikan penjelasan yang memadai tentang partisipasi. Persepsi pengaruh kelompok mungkin penting, tetapi persepsi pengaruh individu juga penting, namun harus didasarkan pada realitas objektif, bukan pada persepsi subjektif saja.

Teori partisipasi selanjutnya adalah model mobilisasi (*the mobilization model*) yang menegaskan bahwa individu berpartisipasi dalam menanggapi peluang politik di lingkungan mereka dan pengaruh dari orang lain. Singkatnya, beberapa orang berpartisipasi karena peluang mereka untuk melakukannya lebih besar daripada orang lain dan juga karena mereka dibujuk untuk terlibat oleh orang lain. Menurut *the mobilization model* bahwa partisipasi politik sangat dipengaruhi oleh aktivitas mobilisasi yang dilakukan oleh partai politik dan organisasi sukarela (*voluntary organizations*). Beberapa studi menunjukkan bahwa kampanye yang dilakukan oleh partai mempunyai pengaruh besar terhadap jumlah suara. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan di Amerika Serikat (Frendreis, Gibson, and Vertz 1990; Huckfeldt dan Sprague 1992; Wielhouwer dan Lockerbie 1994) dan penelitian tentang mobilisasi pemilu di Britain (Johnston 1987; Johnston, Pattie, and Johnston 1989; Johnston and Pattie 1995; Pattie, Johnston, and Fieldhouse 1995).

Temuan-temuan dari studi tersebut memperkuat asumsi model mobilisasi bahwa aktivitas kampanye mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku memilih dari waktu ke waktu. Model mobilisasi dengan jelas menyoroti aspek yang diabaikan oleh model lain. Namun dalam beberapa hal kurang mengembangkan dengan baik model teoritis partisipasi politik, dan hal ini menyisakan banyak pertanyaan yang belum terjawab mengapa orang mau mengubah perilaku mereka dalam merespon pengaruh orang lain. Singkatnya, model mobilisasi belum juga menyediakan teori partisipasi yang komprehensif.

Belajar dari beberapa kekurangan model-model sebelumnya, muncullah model insentif umum (*the general incentives model*) yang berusaha melengkapi kekurangan teori-teori partisipasi sebelumnya. Model insentif umum mencoba melakukan sintesa dari beberapa model partisipasi sebelumnya terutama model pilihan rasional dan psychological sosial. Substansi dari teori ini adalah bahwa para aktor membutuhkan insentif untuk berpartisipasi, namun bukan insentif individual yang dimaknai secara sempit seperti dalam rational choice theory.

Dalam teori partisipasi *general incentives model* terdapat tiga tipe insentif, *pertama*, proses insentif (*incentives process*) yang menjelaskan bahwa motif untuk berpartisipasi bersumber dari proses partisipasi itu sendiri. Bagi sebagian orang, proses politik itu sendiri menarik dan membangkitkan semangat, apa pun hasil atau tujuannya. *Kedua*, insentif hasil selektif mengacu pada motif yang berkaitan dengan pencapaian tujuan tertentu dalam proses politik, namun tujuan tersebut bersifat pribadi dan bukan kolektif. Telah lama diketahui bahwa para pemimpin politik atau pengusaha dapat dikecualikan dari paradoks partisipasi karena mereka mempunyai insentif, seperti pekerjaan yang menarik dan bergaji tinggi serta jabatan yang dapat dipilih. (Salisbury 1969). Tipe ketiga motivasi untuk berpartisipasi adalah ideologi, penjelasannya berakar pada apa yang disebut hukum disparitas lengkung (*law of curvilinear disparity*) (May 1973; Kitschelt 1989).

Model insentif umum secara teoritis memiliki landasan yang kuat dan memiliki kemampuan yang unggul dalam memprediksi jenis partisipasi yang berbiaya tinggi, seperti aktivisme partai (Whiteley 1995). Teori ini menggabungkan *concern* teoretis dari pendekatan pilihan rasional, dengan fokusnya pada biaya dan manfaat pengambilan keputusan, namun tanpa perspektif sempit dan kebutaan terhadap proses psikologis sosial yang lebih umum yang mempengaruhi partisipasi. Dengan penggabungan tersebut, model insentif umum mengatasi kelemahan model lain karena mengabaikan persoalan tentang rasionalitas individu.

Studi tentang partisipasi politik pada masa pandemic Covid-19 sudah pernah dilakukan namun belum menjelaskan secara memadai mengapa terjadi peningkatan partisipasi pada saat pembatasan aktivitas masa pandemic Covid-19. Salah satu di antaranya seperti studi Mikecz dan Oross tentang *Political Participation During the Covid-19 Pandemic in Hungary* (Mikecz, D., & Oross, D. (2020)). Namun studi tersebut tidak focus pada voter turnout dalam pemilu tapi partisipasi masyarakat dalam manajemen dan pengurangan kesehatan, risiko ekonomi, dan kerusakan sebagai dampak pandemic Covid-19.

Beberapa studi tentang partisipasi politik dalam pemilu lokal pada pandemic Covid-19 dilakukan di Indonesia. studi-studi tersebut dilakukan oleh Hadiati dkk., *Voters' Political Participation in the Covid-19 Pandemic on the 2020, Regional Head Election in Pekalongan Regency* (Hadiati, Nugroho, & Utomo, 2022); Ode, *Pemilu dan Covid-19 di Indonesia: Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Serentak 2020* (Ode, Dalupe, Regif, & Jannah, 2022); Rahma dkk., *Political Participation During Pandemic in The Local Election Of Soppeng Regency, Indonesia* (Rahma, Taufik, Hardi, & Alim, 2022). Perspektif studi-studi tersebut memiliki kesamaan pandangan bahwa peningkatan partisipasi politik pada masa pandemic Covid-19 sebagai akibat peran sosialisasi pemerintah dan penyelenggara pemilu. Studi yang sedikit

berbeda dilakukan oleh Rambe, et. al yang membahas peran media massa terhadap partisipasi politik pada pemilu local masa pademi Covid-19.

Berbeda dengan studi-studi di atas, studi ini melihat peningkatan partisipasi politik dalam pemilu lokal pada pandemic Covid-19 di Indonesia dari perspektif the mobilization model and the general incentives model of participation. Perspektif ini dapat memberikan penjelasan yang lebih akurat tentang peningkatan partisipasi pemilih pada masa pandemic Covid-19 dibandingkan dengan faktor sosialisasi pemerintah seperti penjelasan studi-studi sebelumnya. Bahkan, sosialisasi pemerintah yang mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu local pada pandemic Covid-19 bertentangan dengan kebijakan pemerintah untuk membatasi aktifitas masyarakat.

Karena itu, studi ini berupaya menjelaskan fenomena peningkatan partisipasi politik dalam pemilu local pada pandemic Covid-19 di Indonesia dengan menggunakan perspektif yang berbeda dengan studi-studi sebelumnya. Dengan perspektif dimaksud dapat mengungkap motivasi yang sesungguhnya bagi pemilih berpartisipasi dalam pemilu local.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk melihat fenomena yang ada. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan peristiwa, partisipasi politik, suatu keadaan di suatu tempat tertentu secara rinci dalam bentuk narasi. Penelitian ini melakukan kajian terhadap data-data yang diperoleh dari lembaga resmi pemerintah seperti Badan Pusat Statistik, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan lain-lain. Selain data di atas juga melakukan review terhadap pemberitaan media massa dan media online tentang pelaksanaan pemilukada. Data lainnya diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh akademisi, NGO (*Non Government Organization*) pemerhati pemilihan umum dan Lembaga Survey Indonesia. Pengolahan data dilakukan cara melakukan reduksi data dan analisis. Sedangkan data yang dikumpulkan yaitu peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen data organisasi (misalnya data partisipasi, data penyebaran covid-19) yang telah diratifikasi atau dipublikasikan.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan narasi yang jelas mengenai masalah yang akan diteliti berdasarkan apa yang pernah dilakukan atau dialami peneliti. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari lapangan. Dengan pendekatan komparatif dan eksploratif, studi ini akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih. Beberapa studi literatur dalam perspektif komparatif dan studi politik lokal di atas akan sangat membantu sejauh mana faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu lokal di masa pandemik Covid-

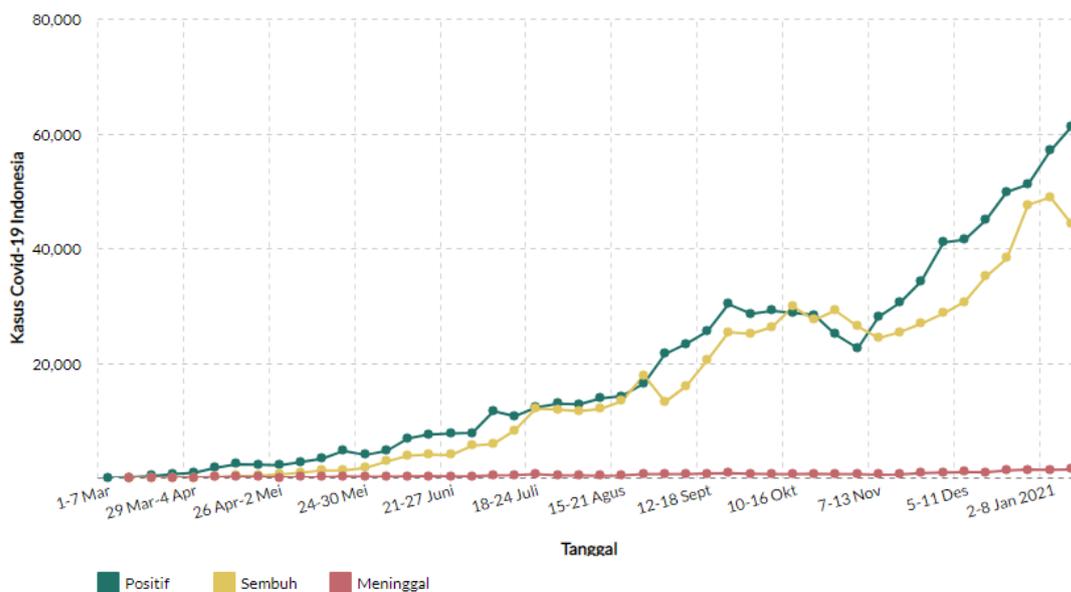
19. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam (Elwan et al., 2022). Kondensasi data merujuk pada proses seleksi, fokus studi, penyederhanaan, ringkasan dan transformasi data dengan tujuan untuk menganalisis apakah terjadi Kontroversi Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah dalam masa Pandemi Covid-19.(Muhammad Elwan et al., 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontroversi Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia Masa Covid-19

Pemerintah Indonesia tetap memaksakan pelaksanaan Regional Head Election pada masa Covid-19 di tengah kontroversi dan kritikan masyarakat. Pemungutan suara berlangsung pada 20 Desember 2020 ketika penyebaran virus Covid-19 semakin meningkat. Bahkan menjelang dan pada saat pelaksanaan regional head election, tingkat penyebaran virus Covid-19 menunjukkan grafik yang semakin meningkat sejak bulan November 2020. Grafik peningkatan virus Covid-19 di Indonesia tahun 2020-2021 dapat dilihat pada gambar 2

Gambar 2. Perkembangan Covid-19 tiap pekan Indonesia 2020-2021



Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022

Namun pemerintah Indonesia tetap memaksakan pelaksanaan regional head election dan merasa optimis akan sukses. Optimisme pemerintah Indonesia saat itu justru menimbulkan pesimisme dari masyarakat dan aktivis demokrasi. Merespon sikap pemerintah tersebut, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini

mengatakan mendorong pemilih menggunakan hak pilih akan menjadi sulit pada masa pandemi virus Corona. "Di masa tidak pandemi pun cukup sulit mendorong pemilih menggunakan hak pilihnya di pilkada, dan bisa semakin sulit di tengah situasi pandemi yang kita hadapi.

Polemik ini terjadi akibat semakin menyebarnya virus corona dan ditambah dengan semakin ketatnya aturan pemerintah berkaitan dengan mobilisasi warga. Pengetatan mobilisasi warga menjadi kebijakan kontroversi dengan dilangsungkannya perhelatan demokrasi di tingkat lokal dengan tetap digendakannya pelaksanaan pilkada walau sempat diundur yaitu sesuai dengan PKPU Tahapan Program dan Jadwal berlangsung tanggal 23 September 2020.

Adapun alasan pemerintah Indonesia tetap melaksanakan pilkada menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD bahwa, *pertama*, menjamin hak konstitusional rakyat untuk dipilih dan memilih sesuai dengan agenda yang telah diatur dalam undang-undang dan atau dalam berbagai peraturan perundang-undangan, *Kedua*, pandemi Covid-19 belum bisa diketahui kapan akan berakhir. Karena itu, apabila Pilkada ditunda sampai Pandemi selesai, maka akan menimbulkan ketidakpastian; *Ketiga*, Presiden juga menurut Mahfud tidak ingin daerah yang menggelar Pilkada hanya dipimpin pelaksana tugas dalam waktu bersamaan. Karena pelaksana tugas itu tidak boleh mengambil kebijakan-kebijakan strategis (Tempo.co, 23/9/2020).

Alasan pemerintah sangat kontroversial karena menunjukkan adanya sikap ambivalensi, *pertama*, di satu sisi, pemerintah menerapkan pembatasan aktivitas yang sangat ketat pada saat pandemic covid-19, namun di sisi lain, memaksakan pelaksanaan plkada yang menghendaki keterlibatan masyarakat secara aktif. *Kedua*, alasan pemerintah tidak ingin menunda plkada dan tidak ingin daerah dipimpin pelaksana tugas tidak konsisten karena pada akhirnya pemerintah Indonesia menunda plkada tahun 2022 menjadi tahun 2024. Akibat penundaan plkada tersebut membuat 272 daerah di Indonesia dipastikan akan dipimpin oleh pelaksana tugas selama 1,5 s.d 2 tahun.

Argumentasi pemerintah sangat kontroversial karena adanya kontradiksi antara kebijakan penanganan wabah pandemic covid-19 dengan pelaksanaan regional head election. Mestinya, alasan normatif maupun praktis harus disampaikan secara logis kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan karena merekalah yang akan terdampak dari kebijakan tersebut. Kebijakan yang dibuat juga mestinya mengandung tingkat konsistensi yang tinggi sehingga kepercayaan masyarakat terhadap negara/pemerintah tidak merosot.

Anomali partisipasi politik Indonesia.

Regional Head Election di Indonesia berlangsung pada masa Covid-19 dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi, 76,09 persen (KPU, 2020). Jika dibandingkan dengan 3 pemilukada sebelumnya yakni tahun 2015, tahun 2017 dan tahun 2018 peningkatannya

cukup signifikan yaitu meningkat 6,74% dari tahun 2015, meningkat 1,2% dari tahun 2017, dan meningkat 1,17% dari tahun 2018.

Tingginya tingkat partisipasi pemilih pada Regional Head Election di Indonesia pada masa pandemic covid-19 menunjukkan keanehan tersendiri dalam trend demokrasi modern. Kondisi tersebut disebut sebagai keanehan karena tiga alasan, *pertama*, tren global terkini rata-rata jumlah pemilih telah menurun secara signifikan sejak awal tahun 1990an. Secara global, jumlah pemilih telah menurun dalam beberapa dekade terakhir, dengan sebagian besar negara mencatat jumlah pemilih yang lebih rendah pada pemilu baru-baru ini dibandingkan pada pemilu 20-30 tahun yang lalu. Tingkat partisipasi pemilih global menurun tajam pada tahun 1990an menjadi 70 persen, dan terus menurun hingga mencapai 66 persen pada periode 2011–15. Menurut Indeks Demokrasi Economist Intelligence Unit, “demokrasi global terus mengalami penurunan pada tahun 2020” (EIU, 2021). Menurunnya jumlah pemilih menandakan adanya permasalahan besar yang dihadapi negara-negara demokrasi saat ini. Jumlah pemilih yang lebih rendah menunjukkan bahwa lebih sedikit warga yang menganggap pemilu sebagai instrumen utama untuk melegitimasi kendali partai politik atas pengambilan keputusan politik. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa masyarakat kurang tertarik pada partai politik sebagai lembaga utama perwakilan demokras (Solijonov, 2016: 9).

Keanehan kedua adalah indikator-indikator pendukung tidak memungkinkan bagi peningkatan voter turnout. Indikator kepercayaan publik terhadap pemerintah Indonesia menjelang dan saat pelaksanaan pilkada sedang menurun drastis, Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurun, terutama dalam menangani Covid-19. Ini terlihat dari tren kepercayaan responden yang semakin menurun sejak September 2020 menjelang pilkada. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah meningkat sejak November 2020. Saat itu sebanyak 14,3% responden sangat dan tidak percaya terhadap kinerja Jokowi dalam menangani pandemi. Ketidakpercayaan publik terhadap kemampuan Jokowi menangani Covid-19 meningkat menjadi 15,2% pada Februari 2021 dan semakin meningkat pada Juni 2021 sebesar 22,6% (Suvei LSI 20-25 Juni 2021). Selain kepercayaan public, indicator ekonomi juga tidak mendukung bagi peningkatan partisipasi publik. Trend perkembangan perekonomian dunia serta nasional terutama pada kuartal II Tahun 2020 dan seterusnya dapat dikatakan mengalami terjun bebas bahkan telah mengalami resesi. Hal ini dapat terlihat pada data International Monetary Fund (IMF) bahwa laju pertumbuhan ekonomi beberapa negara di dunia seperti Amerika Serikat pada data kuartal IV Tahun 2020 adalah -2,4 persen, Korea Selatan adalah -1,4 persen, Jepang -1,2 persen dan Singapura -3,8 persen. Tidak terkecuali bagi Indonesia berdasarkan rilis data Badan Pusat Statistik, bahwa laju pertumbuhan

ekonomi nasional pada Tahun 2020 kuartal I adalah 2,97 persen, kuartal II adalah -5,32 persen, selanjutnya pada kuartal III adalah -3,49 persenan kuartal IV adalah -2,19 persen bahkan, pertumbuhan jauh di bawah pencapaian Kuartal I 2019 yang mencapai 5,07 persen (BPS, 2020). Kondisi ini merupakan periode terburuk sejak Tahun 1999 bagi Indonesia, dalam waktu singkat dapat mengalami penurunan drastis.

Keanehan ketiga adalah peningkatan voter turnout justru terjadi ketika pembatasan aktivitas pada saat puncak wabah pandemic covid-19. Hal ini bertentangan dengan logika partisipasi politik yang memerlukan kebebasan untuk beraktivitas. Anehnya tingkat partisipasi pemilih justru lebih tinggi ketika terjadi pembatasan aktivitas saat penyebaran wabah pandemic covid-19 dibandingkan dengan tingkat partisipasi pemilih pada saat tanpa pembatasan aktivitas dalam situasi normal.

Fenomema tingginya voter turnout di Indonesia masa pandemi Covid-19 tahun 2020 dapat disebut sebagai anomali demokrasi modern. Tentu saja ada beberapa kondisi yang membuat fenomena demokrasi Indonesia memiliki "keunikan" tersendiri terutama terkait dengan tingginya voter turnout tersebut. Paling tidak, terdapat tiga faktor penjelas peningkatan partisipasi pemilih dalam pilkada pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020. *Pertama*, gencarnya sosialisasi pemerintah. Menjelang pilkada serentak 2020, pemerintah melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat untuk menyukseskan pelaksanaan hajatan demokrasi lokal tersebut. Upaya ini sekaligus merupakan cara pemerintah untuk menepis keraguan banyak kalangan karena pelaksanaan pilkada serentak 2020 masih dalam masa pandemi Covid-19. Banyak kalangan masyarakat yang mengkhawatirkan soal kesuksesan pilkada dan bahaya kesehatan masyarakat bila pilkada tetap digelar di masa pandemi Covid-19. Namun pihak pemerintah tetap pada pendiriannya memaksakan pelaksanaan pilkada walaupun masih dalam suasana penyebaran wabah pandemi corona. Untuk memuluskan kebijakannya yang menyulut kontroversi, pemerintah mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki untuk meyakinkan masyarakat dapat terlibat dalam pelaksanaan pilkada tersebut. Salah satu cara yang ditempuh adalah melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat agar tidak khawatir dengan situasi saat pelaksanaan pilkada.

Kedua, tingkat kompetisi yang tinggi antara kandidat kepala daerah. Fenomena seperti ini menjadi hal yang lumrah dalam setiap kontestasi politik termasuk dalam regional head election, terutama yang masih melibatkan calon petahana. Untuk mempertahankan kekuasaannya, calon petahana mengerahkan segala potensi yang dimilikinya demi meraih simpati para pemilih. Persaingan antar calon ikut melibatkan emosi pendukung masing-masing dengan berbagai strategi. Kedekatan emosional antara calon dan pendukung memicu antusiasme yang tidak jarang mengarah pada konflik. Hubungan emosional dan antusiasme menjadi faktor pendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pilkada.

Ketiga, mobilisasi dana bantuan sosial (bansos) secara masif. Bersamaan dengan proses pelaksanaan regional head election serentak 2020, pemerintah Indonesia sedang melakukan upaya pemulihan dampak dari wabah Covid-19. Salah satu bentuk pemulihan yang dilakukan pemerintah adalah memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat terdampak wabah Covid-19. Sebagai langkah awal pada bulan Januari tahun 2020 pemerintah menyalurkan anggaran Rp. 9 Triliun sebagai dana bantuan sosial yang disalurkan ke seluruh daerah di Indonesia (info@kemsos.go.id, 27/12/2019).

Menjelang pelaksanaan regional head election 2020, pemerintah semakin intens menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat. Bantuan sosial lebih masif pada saat regional head election 2020 dibandingkan dengan regional head election pada masa-masa sebelumnya. Dari sisi total jumlah bansos tahun 2020 juga lebih fantastis, yakni mencapai Rp 234,33 triliun. Menurut penjelasan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indarwati, jumlah dana bantuan sosial tersebut mengalami perubahan dari semula Rp 203,9 triliun menjadi Rp 234,33 triliun (CNN Indonesia, Selasa, 10/11/2020). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah yang sudah fantastis masih bertambah lagi pada bulan November 2020 atau satu bulan sebelum pilkada serentak Desember 2020.

Namun, program pemerintah ini banyak dimanipulasi oleh para kepala daerah (*incumbent*) yang kembali mencalonkan diri sebagai bahan kampanye dan pencitraan diri mereka dalam regional head election. Hal ini berdasarkan temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mengungkap penyelewengan bantuan sosial (bansos) terkait pandemi virus corona (Covid-19) untuk kampanye regional head election 2020 di 23 daerah. Modus penyelewengannya adalah mengklaim bansos corona sebagai pemberian kepala daerah atau partai politik tertentu. Padahal, bansos digelontorkan menggunakan APBN/APBD (CNN Indonesia 20/7/2020). Bawaslu mencatat, dugaan politisasi bansos oleh kepala daerah yang berpotensi kembali mencalonkan terjadi di pada sebagian besar provinsi dan kabupaten kota.

"Kami juga mencatat ada di dua belas provinsi dengan 23 kabupaten kota yang terdapat pembagian bansos dan diduga dipolitikasi dengan menempelkan gambar kepala daerah yang berpotensi menjadi petahana," ungkapnya

Di luar temuan Bawaslu sesungguhnya masih banyak yang belum terungkap kepala daerah petahana yang terindikasi memanfaatkan dana bansos untuk kampanye dan pemenangan pilkada. Para kepala daerah secara sengaja menggelontorkan bantuan sosial pada saat pelaksanaan pilkada untuk menarik simpati pemilih. Bak gaung bersambut, masyarakat yang sedang mengalami kesulitan hidup menyambut bantuan sosial tersebut dengan rasa suka cita.

Gencarnya penyaluran maupun manipulasi bantuan sosial menjelang pelaksanaan regional head election 2020 mendorong masyarakat lebih antusias untuk berpartisipasi dalam pilkada. Jika dibandingkan dengan dua faktor yang disebut sebelumnya (sosialisasi dan kompetisi kandidat), maka bantuan sosial menjadi faktor yang sangat kuat mendorong masyarakat ikut berpartisipasi dalam regional head election serentak. Jumlah dana bantuan sosial yang berlipat ganda jika dibandingkan dengan beberapa pilkada-pilkada sebelumnya dan manipulasi dana bantuan social telah memicu peningkatan angka partisipasi pada pilkada 2020 meskipun dalam situasi penyebaran wabah Covid-19. "Kemurahan hati" pemerintah memberikan bantuan sosial membuat masyarakat melupakan sejenak wabah corona untuk ikut berpartisipasi dalam pilkada. Karena itu, angka partisipasi dalam pilkada dalam suasana Covid-19 lebih tinggi dibandingkan dengan pilkada-pilkada sebelumnya.

Jika mengikuti logika berpikir dari model-model partisipasi politik maka tingginya keterlibatan masyarakat dalam pilkada 2020 merupakan sintesis model mobilisasi dan model partisipasi insentif umum. Individu berpartisipasi dalam menanggapi peluang politik dan rangsangan dari orang lain. Selain itu individu menjadi aktif secara politik sebagai respons terhadap berbagai macam insentif. Namun dalam konteks regional head election di lebih bersifat pragmatis karena peluang dan insentif yang diharapkan berupa materi. Daya tarik bansos telah menggiring kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam pilkada bukan karena substansi dari pilkada itu sendiri sebagai instrumen penyaluran aspirasi politik. Artinya, masyarakat terlibat dalam pilkada bukan karena kesadaran sendiri tetapi lebih terdorong oleh faktor-faktor di luar dirinya yang lebih menarik. Hal inilah yang membuat pilkada serentak 2020 sedikit aneh: berlangsung dalam suasana penyebaran wabah penyakit tapi angka partisipasi sangat tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan situasi paradoks antara pembatasan aktivitas warga dan kebutuhan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di tengah pandemi Covid-19, kesimpulan menunjukkan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi pada Pilkada 2020 di Indonesia merupakan anomali demokrasi. Faktor-faktor seperti sosialisasi intensif pemerintah, persaingan antar kandidat yang ketat, dan mobilisasi dana bansos menjadi pendorong peningkatan partisipasi pemilih. Anomali ini menciptakan sintesa antara model mobilisasi dan model insentif umum partisipasi, yang secara teoritis mencerminkan dinamika pragmatis dalam konteks pemilihan di masa pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I., & Fishbein, M. (1969). The prediction of behavioral intentions in a choice situation. *Journal of Experimental Social Psychology*, 5(4), 400–416. [https://doi.org/10.1016/0022-1031\(69\)90033-X](https://doi.org/10.1016/0022-1031(69)90033-X)
- BPS. (2021). *Ekonomi Indonesia 2020 Turun sebesar 2,07 Persen (c-to-c)* (No. 329097). Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html>
- Finkel, S. E., Muller, E. N., & Opp, K.-D. (1989). Personal Influence, Collective Rationality, and Mass Political Action. *American Political Science Review*, 83(3), 885–903. <https://doi.org/10.2307/1962065>
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research*. Addison-Wesley Pub. Co.
- Frendreis, J. P., Gibson, J. L., & Vertz, L. L. (1990). The Electoral Relevance of Local Party Organizations. *American Political Science Review*, 84(1), 225–235. <https://doi.org/10.2307/1963639>
- Hadiati, T. L., Nugroho, H., & Utomo, D. T. B. (2022). Voters' Political Participation in the Covid-19 Pandemic According to the Geography and Topography Condition of the Region (Study on the 2020 Regional Head Election in Pekalongan Regency). *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 7(3), 391–407. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v7i3.40812>
- Huckfeldt, R. R., & Sprague, J. (1995). *Citizens, Politics and Social Communication: Information and Influence in an Election Campaign* (J. H. Kuklinski, R. S. Wyer, & S. Feldman, Eds.; 1st ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511664113>
- Johnston, R. J., Pattie, C. J., & Johnston, L. C. (1989). The impact of constituency spending on the result of the 1987 British general election. *Electoral Studies*, 8(2), 143–155. [https://doi.org/10.1016/0261-3794\(89\)90031-0](https://doi.org/10.1016/0261-3794(89)90031-0)
- kemensos.go.id. (2019). Kemensos Siap Salurkan Rp9 Triliun untuk Bansos pada Januari 2020. kemensos.go.id.
- Kitschelt, H. (1989). The Internal Politics of Parties: The Law of Curvilinear Disparity Revisited. *Political Studies*, 37(3), 400–421. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1989.tb00279.x>
- Kompas.com. (2021, July 18). LSI: Tingkat Kepercayaan Publik pada Jokowi dalam Tangani Pandemi Capai Titik Terendah. [Kompas.Com](https://nasional.kompas.com). <https://nasional.kompas.com>
- May, J. D. (1973). Opinion Structure of Political Parties: The Special Law of Curvilinear Disparity. *Political Studies*, 21(2), 135–151. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1973.tb01423.x>
- Mikecz, D., & Oross, D. (2020). Political Participation, Volunteering During the COVID-19 Pandemic in Hungary. *Corvinus Journal of Sociology and Social Policy*, 175–177. <https://doi.org/10.14267/CJSSP.2020.2.15>
- Miller, W. E., & Shanks, J. M. (1996). *The new American voter*. Harvard University Press.
- Muhammad Elwan, L. O., Rahman, R., & Fitri Cahyani, E. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN PRAVELANSI STUNTING ANAK BALITA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWA. *Journal Publicuho*, 5(2). <https://doi.org/10.35817/jpu.v5i2.25130>
- Muller, E. N., Dietz, H. A., & Finkel, S. E. (1991). Discontent and the Expected Utility of Rebellion: The Case of Peru. *American Political Science Review*, 85(4), 1261–1282. <https://doi.org/10.2307/1963945>

- Ode, S., Dalupe, B., Regif, S. Y., & Jannah, D. A. (2022). Pemilu dan COVID-19 di Indonesia (Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Serentak 2020). *Journal of Political Issues*, 4(1), 29–41. <https://doi.org/10.33019/jpi.v4i1.74>
- Olson, M. (2009). *Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups*. Harvard University Press.
- Pattie, C. J., Johnston, R. J., & Fieldhouse, E. A. (1995). Winning the Local Vote: The Effectiveness of Constituency Campaign Spending in Great Britain, 1983–1992. *American Political Science Review*, 89(4), 969–983. <https://doi.org/10.2307/2082521>
- Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. *Proceedings of the 2000 ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work - CSCW '00*, 357. <https://doi.org/10.1145/358916.361990>
- Rahma, A. A., Taufik, A., Hardi, R., & Alim, I. (2022). Political Participation During Pandemic In The Local Election Of Soppeng Regency, Indonesia. *Journal of Contemporary Local Politics*, 1(1), 17–23.
- Republika.co.id, Republika. co. (2020, September 12). Mahfud: Pemerintah tak akan Tunda Lagi Pilkada 2020. *REPUBLIKA.CO.ID*. <https://republika.co.id/berita/qgil0n428/mahfud-pemerintah-tak-akan-tunda-lagi-pilkada-2020>
- Saleh, Muh. (2022). PARTISIPASI POLITIK (SEBUAH ANALISA PEMILUKADA PADA MASA PENDEMI COVID). *Journal Ilmiah Rinjani (JIR)*, 10(1), 146–159.
- Salisbury, R. H. (1975). Research on Political Participation. *American Journal of Political Science*, 19(2), 323. <https://doi.org/10.2307/2110440>
- Shapiro, R. Y., Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1996). Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics. *Political Science Quarterly*, 111(4), 706. <https://doi.org/10.2307/2152095>
- Solijonov, A. (2016). *Voter turnout trends around the World*. IDEA.
- The Economist. (2021, February 2). Global democracy has a very bad year. *The Economist*.
- Uberoi, Elise. (2021). *Turnout at elections* (1st ed.). Commons Library Research Briefing. <https://assets-learning.parliament.uk/uploads/2021/12/Turnout-at-Elections.pdf>
- Verba, S., & Nie, N. H. (1987). *Participation in America: Political democracy and social equality* (University of Chicago Press ed). University of Chicago Press.
- Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and equality: Civic voluntarism in American politics*. Harvard University Press.
- Whiteley, P. F., Seyd, P., Richardson, J., & Bissell, P. (1994). Explaining Party Activism: The Case of the British Conservative Party. *British Journal of Political Science*, 24(1), 79–94. <https://doi.org/10.1017/S0007123400006797>
- Wielhouwer, P. W., & Lockerbie, B. (1994). Party Contacting and Political Participation, 1952-90. *American Journal of Political Science*, 38(1), 211. <https://doi.org/10.2307/2111342>